

The Effectiveness of the Personnel Management Information System (SIMPEG) at the Sidoarjo District Civil Service Agency (BKD)

[Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo]

Ni'matus Hilda Salsabillah¹⁾, Lailul Mursyidah²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email : lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. In order to realize comprehensive, accurate and fast personnel information as well as to improve effectiveness and efficiency, especially in the field of information management and data processing, an information system called SIMPEG is utilized. The aim of this research is to analyze and describe the effectiveness of SIMPEG at BKD Sidoarjo Regency by using a descriptive qualitative method with an approach through observation and interviews and using primary and secondary data types. In this study, the writer used a purposive sampling technique. The theory used in this study is the theory of effectiveness according to Richard M. Steers (1980:1). There are three indicators in this theory, namely goal attainment, integration and adaptation. In the indicators of achieving the objectives, the researcher found that the achievement of the objectives was carried out in stages. Then on the integration indicator, the Sidoarjo Regency BKD has conducted outreach to all ASNs involved, even though it was only at the beginning of SIMPEG's emergence. Whereas in the adaptation indicators, both the resources for facilities and infrastructure are in accordance with the required needs even though SIMPEG development continues

Keywords - policy effectiveness, personal management, local government, information system

Abstrak. Untuk mewujudkan informasi kepegawaian yang menyeluruh, akurat dan cepat serta melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi khususnya pada bidang pengelolaan informasi dan pengolahan data, dimanfaatkan sistem informasi bernama SIMPEG. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas SIMPEG pada BKD Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan melalui observasi dan wawancara serta menggunakan jenis data primer dan sekunder. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori efektivitas menurut Richard M. Steers (1980:1). Terdapat tiga indikator dalam teori ini yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pada indikator pencapaian tujuan peneliti menemukan bahwa pencapaian tujuan dilakukan secara bertahap. Kemudian pada indikator integrasi, BKD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN yang terlibat meskipun hanya di awal kemunculan SIMPEG. Sedangkan pada indikator adaptasi, baik sumber daya sarana dan prasarana sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan meskipun terus terjadi pengembangan SIMPEG.

Kata Kunci - efektivitas kebijakan, manajemen kepegawaian, pemerintah daerah, sistem informasi

I. PENDAHULUAN

Good governance bukan merupakan istilah yang baru di negara Indonesia. *Good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik [1]. *Good governance* juga diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, akuntabel, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan memiliki arti seluruh bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersifat terbuka, bertanggung jawab berarti pemerintah dapat mempertanggung jawabkan kinerja yang telah mereka lakukan kepada warga negara karena mereka dipilih oleh masyarakat dan memikul harapan seluruh warga negara, akuntabel artinya pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah mereka tetapkan, efektif memiliki arti penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan sasaran perencanaan yang telah ditetapkan serta bersifat efisien yang artinya penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berdaya guna, hemat dan tidak berbelit-belit. Di Indonesia, *good governance* yang berdasarkan pada transparansi dapat menjaga kestabilan dari pemerintahan dan demokrasi dalam kurun waktu yang panjang. Tata kelola pemerintahan yang baik

(*good governance*) sudah lama menjadi mimpi bagi Republik Indonesia sebab dengan memiliki sistem pemerintahan yang baik diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, praktik korupsi semakin menurun, dan pemerintah akan lebih bijak terhadap kepentingan warga. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam melawan praktik korupsi, pemerintahan yang transparan dan adil. Berbagai upaya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia, namun pada kenyataannya dalam penerapan *good governance* di Indonesia masih ditemui banyak kekurangan yang disebabkan oleh minimnya transparansi sehingga satu dari banyak syarat pemerintahan yang baik tidak dapat terpenuhi [2]. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik memang diperlukan keterlibatan dan komitmen serta kesadaran dari seluruh pihak yang terlibat baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Pada era otonomi daerah seperti saat ini idealnya dibutuhkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik untuk memperbaiki citra buruk pelayanan publik yang ada di Indonesia. Kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah upaya pemanfaatan teknologi informasi yang diimplementasikan pada sistem pemerintahan yang berperan sebagai bentuk penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan baik bagi masyarakat, instansi pemerintah maupun aparatur sipil negara [3]. Pelaksanaan SPBE ini tidak dapat dijauhkan dari kehadiran *E-government*. *E-government* adalah cara yang digunakan pemerintah untuk menyajikan informasi dan layanan yang lebih memudahkan warga negara dengan memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi yang kreatif dengan aplikasi berbasis web via internet (*web-based internet application*) [4]. Sejak digaungkannya *E-government*, konsep baik dari *E-government* dapat diterima dengan baik oleh pemerintah Indonesia, hal tersebut sejalan dengan mulai bermunculannya web atau aplikasi *E-government* yang digunakan untuk optimalisasi pelayanan publik dan administrasi internal [5].

E-government erat kaitannya dengan penggunaan sistem informasi. Penggunaan sistem informasi memiliki tujuan guna memberikan kemudahan pada pengelolaan dan penyimpanan data sehingga akan diperoleh sebuah sebuah informasi yang akurat dan tepat. Dengan sistem yang akurat dan tepat dapat mengurangi angka kesalahan yang tidak diharapkan sehingga kinerja yang lebih efektif dan efisien dapat ditingkatkan [6]. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah di Indonesia mulai menciptakan berbagai sistem informasi guna mengatasi permasalahan yang mereka hadapi [7]. Pada Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri (Permendagri) No. 70 Tahun 2019 disebutkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah proses pengelolaan informasi pemerintahan daerah baik pada informasi keuangan daerah, pembangunan daerah serta informasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah lainnya [8]. Salah satu pemerintah daerah yang menciptakan sistem informasi ialah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2016 Pasal 4, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo adalah penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Tidak hanya itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo juga melakukan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan terhadap pegawai yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut ialah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2006 silam melakukan pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) ialah sistem informasi berbasis komputer yang diciptakan untuk memberikan pelayanan kepegawaian dengan tersedianya informasi data kepegawaian yang menyeluruh dan akurat. dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten pertama yang menggunakan SIMPEG sebagai sistem informasi yang menyimpan data diri dari seluruh pegawai [9].

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian [10]. Pada sistem ini terdiri dari banyak fitur, diantaranya ialah biodata pegawai beserta foto dari pegawai tersebut, riwayat pendidikan formal, biodata pegawai, pangkat, jabatan, dan lain-lain.

Pada awal kemunculannya, SIMPEG ini hanya dikembangkan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, namun seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pegawai maka dikembangkan pula SIMPEG di lingkungan pemerintah daerah, salah satunya pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten pertama yang menggunakan SIMPEG sebab Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pembangunan SIMPEG sejak tahun 1997, hal tersebut sejalan dengan ditunjuknya Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah percontohan otonomi daerah [11].



Gambar 1. Aplikasi SIMPEG

Untuk prosedur penggunaan SIMPEG sendiri berbeda antara pegawai baru dengan pegawai pindahan. Mekanisme dan prosedur bagi pegawai baru ialah dengan menerima, mengisi, dan menyerahkan kembali Formulir Isian Pegawai (FIP) ke Badan Kepegawaian Daerah, sedangkan mekanisme dan prosedur untuk pegawai pindahan adalah menerima, melakukan pengisian, dan menyerahkan ulang Formulir Isian Pegawai (FIP) yang disertai dengan Foto copy SK CPNS/PNS, kenaikan pangkat dan gaji berkala terakhir, SK pengangkatan pada jabatan, Karpeg, karis/karsu dan lain-lain ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Setelah proses pengumpulan data, selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran database pegawai. Pemutakhiran database pegawai ini berkaitan dengan mutasi pegawai yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah ataupun unit kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta terdapatnya perubahan data pegawai disebabkan oleh adanya mutasi keluarga, mutasi tempat tinggal, mutasi kepegawaian yang dalam pelaksanaannya menjadi wewenang dari setiap unit kerja sehingga pemutakhiran database pegawai dilakukan pada unit kerja masing-masing dan akan berakhir pada pelaporan data yang dimaksud secara bertahap pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar untuk melakukan validasi data. Penggunaan SIMPEG ini memberikan banyak dampak yang positif, apabila SIMPEG ini tidak diterapkan maka akan menghasilkan dampak yang dapat mengganggu kestabilan informasi dan jika memakai cara yang manual akan berakibat pada adanya kemungkinan arsip yang hilang serta memberikan peluang tidak efektif dan efisiennya kinerja para pegawai yang ada di BKD Kabupaten Sidoarjo. Komponen dari SIMPEG ini berisi beberapa modul yang berbeda di setiap bidang.

Kendati menjadi kabupaten pertama yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) bukan berarti dalam penerapannya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo tidak menemui kendala atau permasalahan. Seiring dengan perkembangan zaman, ditemui kendala berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang tidak terhubung dengan aplikasi kepegawaian lainnya seperti E-Kinerja ataupun Sipekat. Sehingga hal tersebut membuat para pegawai yang akan mengganti data diri harus bekerja dua kali yakni pada E-Kinerja dan juga SIMPEG. Berangkat dari permasalahan yang ditemui oleh pada Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo (BKD) tersebut, maka penulis tertarik untuk menelaah bagaimana efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) tersebut.

Dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini, penelitian terdahulu memiliki peran yang cukup penting yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini ialah penelitian terdahulu dengan judul "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ditemukan permasalahan pada penerapan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tenggara yakni kesenjangan sarana dan prasarana antara operator pusat dan user, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan aplikasi ini belum memadai dan masih ditemui keterlambatan user dalam menginput data [12]. Selanjutnya ialah penelitian pada tahun yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG) Di BKD Provinsi Jawa Tengah”, berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pelaksanaan SIMPEG di BKD Provinsi Jawa Tengah belum berjalan secara efektif dilihat dengan menggunakan indikator masukan, operasi dan keluaran dan faktor yang menghambat pelaksanaan dari SIMPEG pada BKD Provinsi Jawa Tengah ialah sumberdaya manusia yang masih terbatas [13]. Penelitian selanjutnya ialah dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Enrekang”, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa penerapan SIMPEG pada BKDD Kabupaten Enrekang belum efektif karena apabila dilihat dari indikator adaptasi dan motivasi belum efektif [14]. Kemudian penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten”, berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan SIMPEG pada BKD Provinsi Banten sudah efektif [15]. Serta penelitian dengan judul “Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam”, hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel SIMPEG tidak berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi [16].

Berdasarkan refensi pada penelitian terdahulu diatas, perbedaan antara penelitian terdaulai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis akan meneliti dan berfokus pada efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten pertama yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah teori efektivitas menurut Richard M. Steers. Efektivitas ialah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana sebuah kelompok atau organisasi mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam teori ini terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur sebuah efektivitas, indikator tersebut ialah pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Apabila dihubungkan dengan permasalahan yang telah disebutkan maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Dalam penelitian terkait “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo” ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar ilmiah [17]. Sedangkan penelitian lainnya menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada penelitian dengan tujuan guna memahami gejala dan fenomena serta komprehensif yang dialami oleh subjek penelitian terhadap beberapa beberapa persoalan seperti tindakan, motivasi, persepsi dan lain sebagainya dengan menggunakan deskripsi sebagai penjelasannya . Dengan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan secara terperinci serta mendalam efektivitas sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Lokasi dari penelitian ini ialah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang mana peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yakni Arum Zahra Nadhif dan Nura Al Ahmadi selaku Analisis Kinerja Sub Bidang Kinerja ASN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo serta Farida Puspitasari selaku Kepala Bidang Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk melengkapi hasil dari penelitian tersebut, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang tersedia seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA). Fokus dalam penelitian ini ialah berhubungan dengan Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, sedangkan fokus indikator pada penelitian ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah program menurut Richard M. Steers yang berisi variabel pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memilih informan dengan berlandaskan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini atau disebut dengan *purposive sampling*. Sedangkan untuk teknik analisis data hasil penelitian berpedoman pada model analisis data dari Miles dan Huberman, teknis analisis data ialah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data non numeric menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian. Kegiatan proses analisis data dibagi menjadi tiga langkah yakni 1) Reduksi data, yakni proses melakukan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksi dan transformasi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 2) Penyajian data, pengumpulan informasi yang tersusun yang memberikan peluang terjadinya penarikan kesimpulan. Mulanya penyajian data pada data kualitatif berbentuk teks naratif, namun seiring dengan

perkembangannya kini banyak ditemui penyajian data kualitatif dengan menggunakan grafik, bagan ataupun matriks. 3) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan penyimpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan [18].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo dengan berdasarkan efektivitas program menurut Richard M. Steers dengan beberapa indikator yakni a) Pencapaian Tujuan, b) Integrasi, dan 3) Adaptasi :

Pencapaian Tujuan

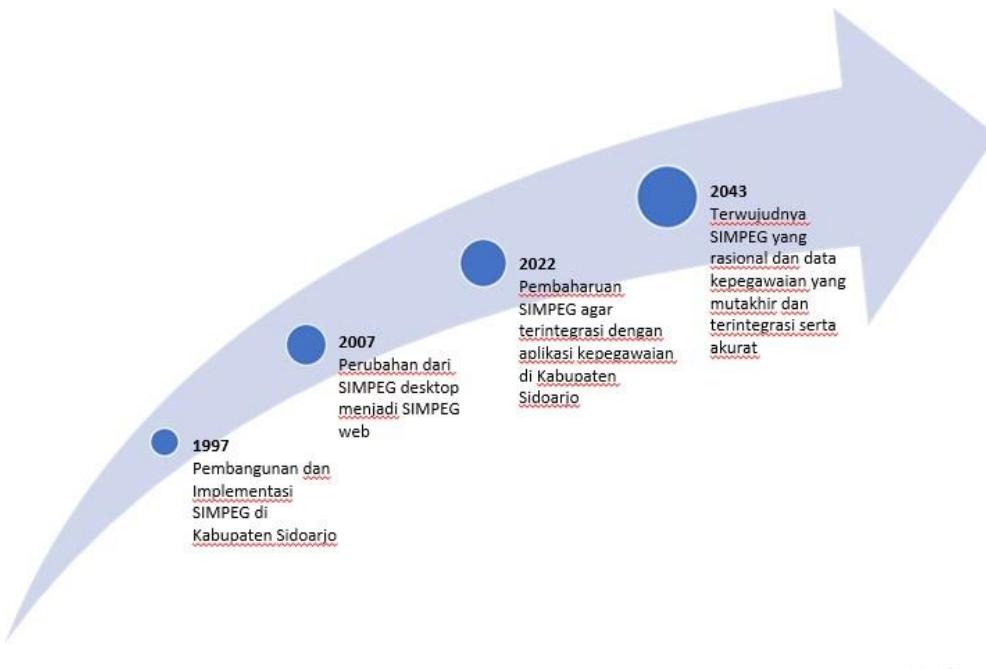
Efektivitas memiliki keterkaitan dengan indikator evaluasi kebijakan yakni apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan dipandang sebagai suatu proses[19]. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah tujuan akhir yang pasti, dibutuhkan sebuah pentahapan baik dalam artian pentahapan bagi pencapaian setiap bagian maupun pentahapan dari tiap periodisasi [20]. Adapun tujuan dari pembangunan aplikasi SIMPEG ialah tersajinya informasi kepegawaian yang menyeluruh, akurat dan cepat sebagai salah satu landasan para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengambil keputusan pada bidang kepegawaian, tujuan lainnya ialah untuk melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi khususnya pada bidang pengelolaan informasi dan pengolahan data sehingga dengan demikian dapat memberikan pelayanan kepegawaian yang transparan dan akuntabel.

Beberapa penelitian serupa menunjukkan bahwa tidak seluruhnya tujuan dari program atau kebijakan yang dijalankan dapat dicapai. Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan menyebutkan bahwa tujuan dari program yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat belum dapat tercapai dikarenakan unit usaha yang dijalankan oleh pihak terkait tersebut belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat [21]. Sedangkan penelitian lain menyebutkan bahwa pencapaian tujuan program pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan dijalankannya program-program pemberdayaan tersebut dan memberikan dampak yang cukup positif namun tidak ada upaya pengembangan agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai lebih maksimal [22].

Hasil penelitian diatas sedikit berbeda dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Tujuan SIMPEG yakni tersajinya informasi kepegawaian yang menyeluruh, akurat dan cepat sudah dapat diwujudkan, hal tersebut dibuktikan dengan terkumpulnya informasi data kepegawaian yang dapat menyeluruh dan dapat diakses oleh admin dan seluruh pengguna. Para aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat dengan mudah mengakses SIMPEG pada ponsel maupun komputer mereka namun hanya terbatas pada data diri yang penting saja seperti nama, pangkat, jabatan dan tempat tanggal lahir tanpa dapat merubah data tersebut. Hal tersebut dikarenakan untuk menghindari penyalahgunaan perubahan data diri secara pribadi oleh aparatur sipil negara. Sedangkan admin SIMPEG yang berada di setiap bidang pada Badan Kepegawaian Sidoarjo dapat melakukan perubahan data sehingga menu yang terdapat pada admin SIMPEG lebih lengkap.

Untuk admin SIMPEG yang tersedia di setiap bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo terdapat menu detail pegawai yang berisi pada menu tersebut memuat tentang data diri dari tiap ASN yang ada di Kabupaten Sidoarjo, pada menu detail pegawai ini terbagi menjadi tiga bagian yakni personal, kontak dan alamat KTP. Pada bagian personal berisi NIP, NIP lama, gelar depan, nama lengkap, gelar belakang, nama panggilan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, status kawin, dan tanggal kawin, Kemudian pada bagian berisi telepon, handphone 1, handphone 2, whatsapp, email, dan email Sidoarjo kab. Serta pada bagian alamat KTP berisi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kodepos. Sedangkan untuk informasi pada SIMPEG yang dapat diakses oleh para pengguna selain admin pengelola yang dalam hal ini ialah ASN di Kabupaten Sidoarjo. Pengguna SIMPEG selain tersebut hanya dapat melihat informasi terkait daftar pegawai di setiap OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang terbatas pada NIP, nama lengkap dan gelar,pangkat, jabatan dan tempat, tanggal lahir.

Namun meskipun demikian, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa untuk mewujudkan sebuah tujuan akhir yang pasti, dibutuhkan sebuah pentahapan baik dalam artian pentahapan bagi pencapaian setiap bagian maupun pentahapan dari tiap periodisasi. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Analisis Kinerja Sub Bidang Kinerja ASN Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo yang menyebutkan bahwa “meskipun database tentang data para ASN yang ada di Kabupaten Sidoarjo sudah dapat diwujudkan dengan kehadiran SIMPEG yang mana hal tersebut berarti tujuan SIMPEG sudah dapat diwujudkan, namun saat ini kita terus melakukan pencapaian tujuan secara bertahap hingga saat ini, seperti saat ini kita sedang mengembangkan SIMPEG yang dapat terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian lainnya”.

Tabel 1. Milestone Pembaharuan SIMPEG

Tabel satu merupakan milestone periodesasi pembaharuan SIMPEG yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan SIMPEG dimulai pada tahun 1997 dan diimplementasikan pada tahun yang sama dimana saat itu Sidoarjo merupakan Kabupaten pertama yang menerapkan SIMPEG. Kemudian seiring berjalanannya waktu, perubahan SIMPEG baik dari perangkat keras maupun lunak terus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman. Pada tahun 2007 telah dilakukan perubahan yang cukup besar sebagai upaya pencapaian tujuan SIMPEG, perubahan tersebut ialah peralihan dari SIMPEG yang berbasis desktop menjadi SIMPEG berbasis web (*online*). Setelah berjalan kurang lebih 15 tahun, periodesasi pembaharuan SIMPEG kembali dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022. Pembaruan tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan SIMPEG dengan aplikasi kepegawaian lainnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo seperti E-Kinerja dan SIPEKAT. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat proses perubahan data para ASN sebab saat ini SIMPEG belum terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian yang ada di Kabupaten Sidoarjo sehingga membuat proses perubahan data lebih membutuhkan waktu yang lebih lama mengingat para admin harus merubah data dua kali yakni pada SIMPEG dan E-Kinerja. Sehingga dengan demikian, tujuan dari SIMPEG yakni untuk melakukan peningkatan terhadap efektivitas dan efisiensi pada pengolahan data dan informasi pegawai dapat diwujudkan. Untuk mencapai tujuan terus, periodesasi perubahan akan terus dilakukan hingga nantinya pada tahun 2043 akan terbentuk sebuah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang rasional serta data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi serta akurat.

Integrasi

Integrasi ialah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, komunikasi dan pengembangan consensus di tengah masyarakat [19]. Indikator integrasi ini berkaitan dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di lapangan. Sosialisasi memiliki peran yang cukup penting dalam mewujudkan keberhasilan dari program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan. Begitu pula dengan aplikasi SIMPEG yang ada pada lingkungan aparatur sipil negara di Kabupaten Sidoarjo, sosialisasi memegang peranan penting untuk keberhasilan dari sistem informasi tersebut [23].

Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan melalui acara rapat dan peningkatan mutu seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sukodono untuk memaksimalkan penerapan aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW) [24]. Namun tidak semua pelaksana program atau kebijakan berhasil dalam menjalankan sosialisasi, terdapat pula pelaksana yang belum maksimal dalam melakukan sosialisasi dikarenakan para sasaran program tersebut belum seluruhnya memahami akan kehadiran dari program tersebut [21].

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada indikator integrasi, pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan sosialisasi ialah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa “untuk kegiatan sosialisasi kita telah melakukan, dengan peserta admin SIMPEG dan pengguna SIMPEG yakni para ASN yang ada di Kabupaten Sidoarjo”.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi untuk mengenalkan SIMPEG terhadap para pegawai, baik pegawai yang berada didalam maupun diluar lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo khususnya bidang pengembangan, para peserta sosialisasi diperkenalkan dan diberikan pemahaman seputar pemanfaatan SIMPEG. Tidak hanya itu, agar para pengguna SIMPEG memahami bagaimana penggunaan SIMPEG, pada akhir kegiatan sosialisasi dilakukan praktik pengoperasian SIMPEG. Tidak cukup hanya dengan kegiatan sosialisasi, pada awal kemunculan SIMPEG Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan merujuk pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 juga melakukan beberapa diklat. Dengan kegiatan diklat tersebut diharapkan para pengelola SIMPEG dapat lebih kompeten dalam mengoperasikan SIMPEG.

Meskipun pembaharuan SIMPEG terus dilakukan, namun sosialisasi bagi para pengguna SIMPEG di ruang lingkup Kabupaten Sidoarjo kurang dilakukan, hal tersebut dikarenakan hanya dilakukan satu kali kegiatan sosialisasi ketika awal kemunculan SIMPEG. Hal tersebut dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo menganggap bahwa yang perlu mendapatkan sosialisasi secara bertahap pada setiap pengembangan SIMPEG ialah para admin sebab mereka yang memegang kendali dari SIMPEG baik perubahan data dan lain sebagainya sedangkan para pengguna hanya perlu mengajukan perubahan pada admin SIMPEG apabila terjadi perubahan data diri.

Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya [19]. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan yang ada di lapangan. Dengan demikian, digunakan tolak ukur berupa kesediaan petugas dan sarana prasarana [25].

Penelitian yang terdahulu menyebutkan bahwa indikator adaptasi terdiri dari kemampuan sarana dan prasarana, dan sebagai upaya peningkatan potensi sumber daya manusia diperlukan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan studi banding untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan [26]. Kemudian penelitian lain menyebutkan bahwa dalam adaptasi diperlukan beberapa kriteria dalam pengadaan serta pengisian tenaga kerja guna mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian dan dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman [27].

Sejalan dengan beberapa penelitian diatas, bahwa adaptasi yang dimaksud ialah terkait penyesuaian yang berwujud kesiapan para petugas atau admin aplikasi SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo serta sarana prasarana yang menunjang dalam implementasi aplikasi SIMPEG. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa “para sumber daya manusia yang menjadi admin pengelola SIMPEG sudah dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan kemampuan mereka sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi disetiap periodesasi pembaharuan pada SIMPEG yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo”.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian pada indikator adaptasi menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dalam hal ini terdiri dari para petugas atau admin dari aplikasi SIMPEG mampu mengoperasikan dan memberikan pelayanan terhadap para pegawai serta dapat beradaptasi dengan pembaharuan fitur dari aplikasi SIMPEG. Sumber daya manusia memiliki peranan yang cukup penting dalam keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan [26]. Capaian tersebut tidak terlepas dari penataan atau penugasan setiap individu yang berkompeten pada bidangnya. Sumber daya manusia yang tidak mampu mengoperasikan teknologi tentu saja akan menghambat proses optimalisasi penggunaan aplikasi SIMPEG.

Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo formasi admin SIMPEG sudah diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian pada bidang terkait. Admin pengelola SIMPEG terdiri dari para pegawai yang merupakan lulusan dari S1 dengan keahlian programmer komputer, pranata komputer, operator komputer dan analisis kepegawaian.

Kemampuan dari para admin pengelolahan tersebut terus dikembangkan dengan pemberian pelatihan dan diklat tentang pemanfaatan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jenis diklat yang dilakukan ialah Diklat Teknis Jaringan Komputer dan Diklat Teknis Database dengan peserta para pengelola SIMPEG yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari kedua diklat tersebut ialah melakukan persiapan tenaga yang mempunyai kemampuan menjalankan aplikasi SIMPEG dengan baik dan benar, pemberian dasar penerapan program pembuatan laporan, pemberian dasar terhadap

pengelolaan sistem jaringan komputer, pemberian kemampuan dasar pengolahan administrasi data, dan pemberian kemampuan dasar untuk pemeliharaan data base.

Sedangkan untuk menunjang pencapaian tujuan dari aplikasi SIMPEG, sarana dan prasarana juga dihadirkan. Sarana yang disediakan ialah berupa sistem jaringan, komputer, dan jaringan internet. Sedangkan untuk prasarananya ialah perangkat keras, dan aplikasi SIMPEG. Berikut ialah perangkat keras yang digunakan pada SIMPEG Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 3. Perangkat Keras (hardware) Pada SIMPEG

No.	Jenis Perangkat Keras	Spesifikasi
1.	Personal Komputer	<ul style="list-style-type: none"> • Intel core 2 processor • Standard memory 1 GB DDR-2SDRAM PC-53000
2.	Keyboard	Standard keyboard
3.	Mouse	Standard mouse
4.	Monitor	24 inch
5.	Printer	<ul style="list-style-type: none"> • Dot metric • Buffer memory 64kb, pixel resolutions max. 24 millions lines • Monthly usage volume 1000 pages, ink cartridge black ribbon

Sarana yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah mampu beradaptasi dengan kebutuhan di lapangan, namun masih terdapat kendala pada aplikasi SIMPE yang belum terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi SIMPEG merupakan sarana yang digunakan untuk menjebatani komunikasi antara software dengan manusia. Berlandaskan pada permasalahan tersebut, pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo khususnya bidang pengembangan melakukan pengembangan terhadap aplikasi SIMPEG.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan indikator pada pengukuran efektivitas pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dilihat dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pencapaian tujuan, sejauh ini diketahui tujuan dari SIMPEG terkait informasi kepegawaian yang menyeluruh, akurat dan cepat serta melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi khususnya pada bidang pengelolaan informasi dan pengolahan data sehingga dengan demikian dapat memberikan pelayanan kepegawaian yang transparan dan akuntabel sudah dapat diwujudkan namun terus dilakukan pentahapan pencapaian tujuan dengan mengembangkan SIMPEG yang terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian lainnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo

Integrasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sosialisasi meskipun belum dilakukan secara bertahap kepada para pengguna. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada awal kemunculan SIMPEG kepada para pengguna yang dalam hal ini ialah seluruh ASN yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan juga kegiatan diklat bagi admin SIMPEG yang berlandaskan pada Peraturan Bupati No. Tahun 2009 tentang SIMPEG. Namun kegiatan sosialisasi ini dilakukan hanya satu kali pada awal kemunculan SIMPEG.

Adaptasi, pada indikator ini dinilai sudah efektif dikarenakan sumber daya manusia yang mengelola SIMPEG sudah sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan dan untuk sarana prasarana sudah cukup memadai dan terus dilakukan pembaharuan sesuai dengan zaman meskipun dari segi SIMPEG yang belum terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian lainnya namun saat ini sudah dalam proses pengembangan agar terintegrasi dengan aplikasi kepegawaian lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Padan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang

terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya kedua orang tua saya dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo tempat dimana saya melakukan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Sejiwa. (2008). Daftar Pustaka Daftar Pustaka. *Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran*, 20(5), 40–43.
- [2] Handayani, A., & Nur, M. I. (2019). *Implementasi Good Governance Di Indonesia I Fitria Andalus Handayani, 2 Mohamad Ichsana Nur I*. 11(1), 1–11.
- [3] Taqiya, N. A., Mukaromah, S., & Pratama, A. (2020). Analisis Tingkat Kematangan Spbe Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa Timur. *SCAN - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(1), 22–33. <https://doi.org/10.33005/scan.v15i1.1849>
- [4] Doramia Lumbanraja, A. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 220–231. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>
- [5] Menopang, D., Kesehatan, P., Indonesia, D. I., Ilmu, F., & Universitas, K. (2016). *Prosiding seminar nasional komunikasi 2016. November*, 344–351.
- [6] Afdoli, A. A., & Malau, H. (2019). Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Online Rawat Jalan Di Rsup M Djamil Kota Padang. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 1–24.
- [7] Athin Pratiwi. (2018). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bidang Sumber Daya Manusia (Sdm). *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, Vol. 02 No. 02, Oktober 2018 ISSN: 2222-3333 /, 02(02), 12.
- [8] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- [9] Pendidikan, M., Universitas, F. I. P., & Surabaya, N. (2018). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN SIDOARJO Arif Jurachman*.
- [10] A_01_GITA_BONITA_RAMADANTI_1500209_2019.pdf.(n.d.).
- [11] Perbup_06_2009.pdf. (n.d.).
- [12] Asadiky, F. (n.d.). *Asdaf Provinsi Sumatera Utara Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*.
- [13] Denaya, A., & Djumriati, T. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Bkd Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
- [14] Diani, N. R. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Enrekang. *Universitas Hasanudin*, 103. <https://core.ac.uk/download/pdf/83871006.pdf>
- [15] Tasya, Siti ChaerunnisaTasya, S. C. (2017). E. P. S. I. M. K. (SIMPEG) di B. K. D. P. B. J. A. B. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 158 pages.
- [16] Kusumaningrum, R. A., Iranita, & M.Syuzairi. (2021). Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. (Online) ISSN. *Soj Umrah*, 2(2), 1348–1357. <http://www.bioline.org.br/>
- [17] Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1–8). yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- [18] Yunengsih, S., & Syahrilfuddin, S. (2020). the Analysis of Giving Rewards By the Teacher in Learning Mathematics Grade 5 Students of Sd Negeri 184 Pekanbaru. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 4(4), 715. <https://doi.org/10.33578/pjr.v4i4.8029>
- [19] Puri Dita Putri Wijaya.pdf. (n.d.).
- [20] Baria, K. (2019). Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. *Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unuversitas Muhammadiyah Makassar 2019*, 53(9), 1689–1699.
- [21] Jaya, J. (2019). Jurnal Penelitian Tolis Ilmiah. *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian*, 1(2), 124–129.
- [22] Sari, C. N., Heriyanto, M., & Rusli, Z. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

- Berbasis Rukun Warga. *Program Studi Magister Ilmu Administrasi*, 15, 135–141.
- [23] Yuniningsih, T., & Kharisma, D. (2014). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 54(7), 283–288.
 - [24] Rahayu, N. V., Sukmana, H., Studi, P., Publik, A., & Sidoarjo, M. (2022). *PUBLIK DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO*. 12(Desember), 262–272.
 - [25] Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2017). *PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung) PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)*.
 - [26] Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Efektivitas Program Pajak Online Terpadu (Ponter) Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik. *Efektivitas Program Pajak Online Terpadu (Ponter) Dalam Rangka Inovasi Pelayanan Publik*, 1(1), 1–8.
 - [27] Maleke, T. S., Pangkey, M., & Tampongangoy, D. (2022). Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(119), 27–36.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.